

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang harus diamati untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat saat ini yaitu tuntutan untuk organisasi yang bergerak di bidang jasa seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemda maupun lembaga-lembaga negara yang dituntut dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Tuntutan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan pertanggungjawaban atas menyusun, menyajikan, melaporkan dan pemberian informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2018).

Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara (Mardiasmo, 2018).

Berkaitan dengan isu pentingnya tentang akuntabilitas (Haque, 1997) dalam (Pamungkas, 2012) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas senantiasa dikaitkan dengan meningkatnya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu dengan mendorong terciptanya tuntutan dalam memenuhi peraturan yang ada atas kinerja akuntabilitas. Hal ini dilakukan agar lebih berakuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain dimana transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi sedangkan akuntabilitas menyangkut pada proses pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Objek penelitian ini dilakukan pada 15 website resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai menggunakan content analysis dengan melihat empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (Scant or None) atau tidak cukup transparan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Akutabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya (Indra Basian, 2010).

Akuntabilitas mengandung arti sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban (Halim, 2014:83).

Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan beberapa prinsip *good governance* diatas, karena akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan keuangan daerah. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem maupun laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya pelaporan mengenai informasi akuntansi yang kurang dan tidak akurat akan terlihat bahwa kinerjanya kurang dalam partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018).

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terakit dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada kecamatan yang merupakan bagian wilayah administratif dibawah kabupaten. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Kecamatan atau sebutan lain wilayah kerja camat sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan kabupaten/kota. (PP. 17 tahun 2018)

Upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Di sisi lain publikasi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah terutama pada instansi kecamatan.

Objek penelitian ini memilih pada Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah. Dimana anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dan realisasi. Dana yang dipakai diperoleh dari APBD yang berupa dana Desa. Maka peneliti tertarik untuk mengambil pada objek tersebut untuk dilakukannya penelitian akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah Khususnya Kecamatan, oleh karena itu setiap kecamatan harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Keterbukaan merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan dapat juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Transparansi juga dapat diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Instansi Kecamatan dengan judul : “Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan untuk mempermudah pembahasan penelitian ini memberikan perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Akuntabilitas di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana Transparansi di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah
3. Untuk mengetahui Transparansi di Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagi Teoritis
Hasil peneliti ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada setiap instansi.
2. Bagi Praktis
Hasil peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti lain dan bahan untuk menambah pengetahuan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.